

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum

mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 23, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

- (1) Pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barangbarang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

- (1) Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- (2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- (3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri yang memberikan sanksi kepada anak nakal berupa tindakan tersebut, maka Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peran yang sangat penting untuk membina dan

membimbing klien (anak nakal) agar dapat memperbaiki diri sendiri, serta tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS), menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP disebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para narapidana anak yang telah memperoleh putusan berupa tindakan dari Pengadilan Negeri Surakarta, tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala baik secara interen maupun eksteren. Kendala yang

biasanya dihadapi BAPAS dalam menjalankan program bimbingan ini, meliputi: kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, dan kendala yang berhubungan dengan stigma atau cap, serta kendala dalam hal fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembinaan terhadap para anak nakal terhambat dan kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul "Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan"

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.
2. Kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan?
2. Apa kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.

F. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian¹ pada pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72-79

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dan anak binaan BAPAS.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, berasal dari buku tentang peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang akan penulis lakukan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dengan cara :

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.²

2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat³, yaitu Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan anak binaan BAPAS Kota Surakarta.

5. Teknik Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data primer dengan teknik *editing*, yaitu meneliti,

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 21

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95

menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan³⁰, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis penggunaan dalam penulisan tinjauan pustaka.

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang pengaturan sanksi pidana anak di beberapa negara, tinjauan umum tentang tindak pidana anak, dan tinjauan umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan, kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan serta upaya penyelesaian kendala tersebut.

Dalam Bab IV Penutup, penulis uraikan kesimpulan dan saran dari skripsi pada bab-bab terdahulu.